UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/ PHK KARENA PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN PADA PT. X (PERSERO) KANTOR CABANG YOGYAKARTA
VINI VIDYACARLA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan : Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Husni, Lalu. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ed. Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Maimun, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Soepomo, Iman, 1968. *Hukum Perburuhan bagian pertama: Hubungan Kerja*, Jakarta: PPAKRI Bhayangkara.

-------, 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.

Sutedi, Adrian, 2011. *Hukum Perburuhan Edisi 1 Cetakan kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

Ugo dan Pujiyo, 2011. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Indonesia tahun 2004 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) j.o. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang Undang.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA/ PHK KARENA PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN PADA PT. X (PERSERO) KANTOR CABANG YOGYAKARTA
VINI VIDYACARLA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang- Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang- Undang.

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/ 31/ MEN/ XII/ 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan Bipartit.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/ MEN/ VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE- 13/ MEN/ SJ-HK/ I/ 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Materil Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Penulisan Hukum

Gustyawati, Marlia Tety, 2015, "Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pengunduran Diri oleh Dosen dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (Studi Kasus Dosen A di PTS X Yogyakarta"), *Tesis*, FH. UGM, Yogyakarta;

Irvanto, Dwiki, 2015, "Pelaksanaan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pensiun antara Pekerja dengan PT. Prissima melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman", *Penulisan Hukum*, FH. UGM, Yogyakarta;

Isdiana. 2012, "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat pada PT. Sumber Pangan Gisindo, Sleman, Yogyakarta", *Tesis*, FH. UGM, Yogyakarta.